

DPC PDIP BUKA PENDAFTARAN
Cabup-Cawabup Temanggung



KR-Zaini Arrosyid

Pengumuman pendaftaran bakal calon bupati dan wakil lewat DPC PDIP Temanggung.

TEMANGGUNG (KR) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Temanggung resmi membuka pendaftaran dan penjurangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, 10-26 Mei 2024. Wakil Ketua DPC PDIP Temanggung FX Susilo mengatakan pendaftaran terbuka untuk internal maupun eksternal PDIP. Masyarakat yang berminat juga dapat mendaftar lewat PDIP.

“PDI Perjuangan merupakan partai terbuka. Kesempatan dukungan diberikan kepada warga masyarakat yang berminat ingin mendaftarkan diri dalam penjurangan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada Temanggung 2024. Yang penting punya komitmen membangun bangsa dan negara. Pendaftaran gratis atau tidak dipungut biaya,” jelas Susilo.

Panitia penjurangan, Gunawan, menambahkan bahwa semua kader dan anggota PDIP Temanggung memiliki potensi untuk mendaftarkan diri di penjurangan Bacabup dan Bacawabup Temanggung yang dibuka oleh PDIP. “Terbuka untuk warga Temanggung maupun dari luar Temanggung. “Yang akan diusung PDIP Temanggung adalah warga negara Indonesia, di manapun mereka tinggal,” tegasnya. **(Osy)-d**

DI DPC PDIP PURBALINGGA
Kader PKS Ambil Formulir



KR-Toto Rusmanto

Utusan PKS Purbalingga mengambil formulir pendaftaran Cawabup di DPC PDIP Purbalingga.

PURBALINGGA (KR) - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmi Muhammad Hanif mengambil formulir pendaftaran Calon Wakil Bupati (Cawabup) di DPC PDIP Purbalingga, Jumat (10/5). Pengambilan dilakukan dua utusan yang diterima Ketua Tim Penjurangan Pendaftaran Cabup dan Cawabup PDIP Purbalingga, HM Ichwan. Kedua utusan itu, masing-masing Basyirun dan Rifki Aziz yang merupakan kader PKS Purbalingga.

“Keinginan kami memang mendapatkan rekomendasi berpasangan dengan Ibu Dyah Hayuning Pratiwi (Tiw) yang merupakan bupati petahana dari PDIP, untuk maju di Pilkada 2024.” kata Basyirun.

Fahmi merupakan anak kandung anggota Fraksi PKS DPR RI, Rofik Hananto. Sebagai Kader muda PKS, Fahmi dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas yang layak untuk mengikuti kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati. Karena tidak bisa mengusung sendiri, PKS harus berkoalisi dengan partai politik lain.

Ketua Tim Penjurangan Pendaftaran Cabup dan Cawabup PDIP Purbalingga, HM Ichwan menyebutkan, proses penjurangan pendaftaran dibuka 9-17 Mei 2024). Fahmi orang pertama yang mengambil formulir pendaftaran. **(Rus)-d**

PENYALURAN BANTUAN BAZNAS
Menyasar 77 Warga Sukoharjo



KR-Wahyu Imam Ibadi

Bupati Sukoharjo menyerahkan bantuan Baznas untuk warga kurang mampu.

SUKOHARJO (KR) - Sebanyak 77 warga kurang mampu mendapat bantuan dari program Sukoharjo Cerdas, Makmur, Peduli dan Sehat. Total bantuan Rp 168.827.500 bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Penyerahan bantuan dilakukan di lobi kantor bupati, Rabu (8/5), dipimpin Bupati Etik Suryani,

Baznas Sukoharjo menyalurkan berbagai bantuan sesuai dengan pengajuan permohonan warga kurang mampu. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai maupun barang yang penyalurannya diserahkan langsung kepada para penerima. Bantuan program Sukoharjo cerdas diberikan kepada 13 warga kurang mampu dengan total nominal Rp 13.245.000. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai untuk biaya pendidikan anak warga kurang mampu. Nominal yang diberikan kepada warga bervariasi, mulai Rp 1.250.000 sampai dengan Rp 3.000.000 perorang.

Menurut Etik Suryani, Pemkab Sukoharjo mengapresiasi program yang dijalankan Baznas Sukoharjo. Hal mengingat berbagai bantuan yang disalurkan sangat bermanfaat dan ditunggu warga. Di sisi lain, bantuan juga dapat meringankan beban warga kurang mampu. **(Mam)-d**

TURUN 7.000 JIWA DALAM TIGA TAHUN

Purworejo Berhasil Tekan Angka Kemiskinan

KUTOARJO (KR) - Pengentasan kemiskinan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi Pemkab Purworejo. Berbagai upaya telah dilakukan sehingga selama tiga tahun terakhir angka kemiskinan bisa turun 7.000 jiwa.

Hal itu diungkapkan Bupati Purworejo H Yuli Hastuti SH saat menyerahkan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Purworejo di Pendapa Kecamatan Kutoarjo, Jumat (10/5).

Secara simbolis Yuli menyerahkan bantuan senilai Rp 90 juta kepada warga kurang mampu di Kecamatan Kutoarjo. Bantuan itu difokuskan untuk program Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan, konsumtif, kesehatan, dan modal usaha. Banguan juga diberikan kepada marbot, guru ngaji serta guru honoror.

“Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Purworejo turun dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2021

jumlahnya 88 ribu jiwa, tahun 2022 turun menjadi 82 ribu jiwa, dan tahun 2023 turun lagi menjadi 81 ribu jiwa,” kata orang nomor satu di Kabupaten Purworejo ini.

Ditegaskan, Pemkab Purworejo terus menjalin kerja sama dengan Baznas dalam optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh, sebab memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purworejo. “Semakin besar dana yang bisa dikumpulkan, maka semakin banyak warga yang terbantu, sehingga akan sangat mendukung upaya pengentasan kemiskinan,” tandasnya.

Menurutnya, Pemda Purworejo telah mengalokasikan anggaran

untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. Kendati demikian, masih butuh dukungan dari berbagai pihak, sebab pemerintah tentu tidak bisa sendiri dalam mela-

kukan pengentasan kemiskinan. “Banyak alternatif pembiayaan, komunikasi dan dukungan Pemerintah Pusat, menggandeng CSR BUMN/BUMD dan perusahaan swasta, termasuk juga menyalurkan dana Baznas ini,” pungkas Yuli Hastuti. **(*)-d**



KR-Istimewa

Bupati H Yuli Hastuti SH secara simbolis menyerahkan bantuan dari Baznas Kabupaten Purworejo di Pendapa Kecamatan Kutoarjo.

MENJELANG PILKADA PATI 2024

Banyak Tokoh Tolak Calon Tunggal

PATI (KR) - Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pati menolak jika pada pemilihan bupati/wakil bupati atau Pilkada 27 November mendatang hanya muncul pasangan calon tunggal. Mereka mengaku akan sangat kecewa karena tidak bisa mencermati visi misi paslon, serta tidak bisa menikmati kegembiraan demokrasi.

Hal itu diungkapkan sejumlah tokoh demokratisasi di Pati, Jumat (9/5). Sebagaimana diketahui, pada pemilihan bupati/wakil bupati 2017 lalu di Pati terjadi pilkada dengan calon tunggal. Waktu itu semua parpol (kecuali NasDem), mengusung paslon Haryanto/Saiful Arifin. Paslon inilah yang kemudian memenangi pemilihan secara mutlak melawan kotak kosong.

Koordinator Presidium LSM Dewan Kota Drs H Pramudya membeberkan, usai pelaksanaan Musyarah Rakyat (Musra) Pati pada awal pekan lalu pihaknya banyak didatangi sejumlah tokoh masyarakat. Mereka minta disuarakan agar

pada Pilkada 2024 agar tidak terjadi lagi calon tunggal.

Menurutnya, saat ini ada gejala sejumlah elite parpol di Pati bermanuver dengan membentuk koalisi besar parpol peraih suara di DPRD Kabupaten Pati. “Sangat dimungkinkan akan terbentuk koalisi yang sepakat hanya mengajukan satu pasangan calon, seperti pada pilkada tahun 2017,” kata Pramudya.

Cara untuk melawan supaya tidak sampai terjadi pilkada calon tunggal, tambah Pramudya, maka warga Pati harus mulai menyiapkan calon untuk mendaftar melalui jalur independen (perseorangan). “Mungkin pendaftar yang semula akan lewat parpol bisa didorong maju lewat jalur independen. Tapi ini memerlukan kesiapan yang serius. Karena harus mencukupi dukungan, berupa fotocopy KTP, sebanyak 80 ribu lembar,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Sekjen Persatuan Mantan Kepala Desa (Permandes), Jani Prasetyo

SH. “Masyarakat akan bergerak melawan jika sampai terjadi pilkada calon tunggal,” ujarnya.

Diungkapkan, berdasar hasil pilleg Febuari 2024, didapatkan perolehan suara parpol yang memperoleh kursi signifikan di DPRD Pati adalah PDIP, PPP, PKB, PKS, Gerindra, Golkar, NasDem, dan Partai Demokrat. “Kalau terjadi pilkada calon tunggal, justru akan

sangat merugikan parpol. Karena mengusung paslon, yang mungkin tidak dikehendaki konstituennya,” tandasnya.

Ketua Puser Bumi, Budi Antoro memperkirakan, paslon yang akan maju kontestasi Pilkada Pati 2024, berkisar dua atau tiga pasangan. “Ini jumlah yang ideal,” tutur Jani Prasetyo.

(Cuk)-d



KR-Alwi Alaydrys

Presidium LSM Dewan Kota siap mengawal demokratisasi di Pati.

KELILING KAMPUNG SAMBANGI RUMAH WARGA

Etik Suryani Serahkan Bantuan RTLH

SUKOHARJO (KR) Sebanyak tujuh warga dari Desa Gumpang, Ngemplak, Wirogunan dan Singopuran Kecamatan Kartasura menerima penyaluran bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Total bantuan disalurkan sebesar Rp 110.000.000 bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sukoharjo.

Penyaluran bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dengan mendatangi masing-masing rumah warga. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, terendah Rp 10.000.000 dan tertinggi Rp 20.000.000 per-RTLH.

Menurutnya, bantuan diberikan melalui sumber dana Baznas

Sukoharjo. Sebelum penyaluran dilakukan, Baznas Sukoharjo sudah melakukan verifikasi persyaratan dan validasi pengajuan dengan pengecekan langsung ke rumah warga.

“Bantuan yang diberikan ini sangat dibutuhkan dan benar-benar layak untuk warga kurang mampu karena memang kondisi rumah perlu perbaikan,” kat Etik Suryani. Pemkab Sukoharjo bersama Baznas Sukoharjo berusaha keras melakukan rehab rumah tidak layak huni. Bahkan Pemkab akan terus memberikan bantuan untuk rehab RTLH.

Bupati menyebutkan, angka RTLH di Kabupaten Sukoharjo terus menurun dan diharapkan lima tahun ke depan tidak ada lagi

rumah warga yang tidak layak huni. Sementara itu kemampuan rehab setiap tahun mencapai 1.400-1.600 unit RTLH. “Percepatan penuntasan RTLH juga tidak lepas dari partisipasi pemerintah dan swasta mewujudkan rumah layak huni,” ungkap Etik Suryani.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Lanjar Budi Wahyono menambahkan, Pemkab Sukoharjo sangat serius melakukan penuntasan RTLH. Hasilnya, dapat dilihat dalam perkembangan data terakhir jumlah RTLH tersebut di 12 kecamatan terus mengalami penurunan. Hingga akhir tahun 2023 diketahui masih ada 8.275 unit RTLH, yang akan di-

tuntaskan secepatnya. Pemkab Sukoharjo memperkirakan penuntasan tersebut dalam jangka waktu sekitar lima tahun ke depan.

“Bantuan rehab RTLH dilakukan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Sukoharjo, Baznas Sukoharjo, PPPK Bank Jateng, dan Perusahaan Pengembang Perumahan di Kabupaten Sukoharjo. “Pemkab Sukoharjo sangat serius membantu warga miskin atau kurang mampu, salah satunya melalui bantuan rehab RTLH. Bahkan Bupati Etik Suryani turun langsung mendatangi rumah warga untuk mengecek kondisi rumah warga,” kata Lanjar. **(Mam)-d**

PERGELARAN WAYANG DI KARANGANYAR

Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal

KARANGANYAR (KR) - Para pedagang Pasar Tegalgede Karanganyar dihibur pertunjukan wayang kulit dengan lakon Semar Bangun Pasar di lapangan pasar setempat, baru-baru ini. Hiburan rakyat itu dalam merupakan media sosialisasi gempur rokok ilegal.

Pagelaran wayang kulit di siang hari dihadiri pejabat Kantor Bea Cukai Surakarta, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta sejumlah pejabat pemerintah daerah. Para pejabat tersebut mengawali sosialisasi dengan imbauan agar pedagang menghindari bujuk rayu sales rokok bodong.

“Meski tawarannya menggiurkan, namun tak boleh diambil. Aparat bakal menindak tegas pelaku peredaran rokok ilegal. Baik itu produsen, distributor maupun pedagangnya,” kata Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, M Arif Budiman.

Arif juga mengapresiasi sikap pedagang Pasar Tegalgede yang memahami ketentuan itu. Usai

blusukan bersama para pejabat daerah di dalam pasar, ia menyebut para pedagang hanya menjual rokok bercukai legal. “Kita tanyai para pedagang. Sampel saja beberapa. Mereka intinya tahu ketentuan penjualan rokok pabrikaan. Tak mau jual yang bercukai palsu, kedaluwarsa dan tak bercukai,” katanya.

Bea Cukai juga meminta para pedagang memberikan informasi apabila sales rokok ilegal coba-coba menitipkan produknya ke pedagang. “Adanya program gempur

rokok ilegal agar menekan peredarannya. Penerimaan pajak dari barang bercukai menjadi berkurang saat rokok ilegal beredar luas,” ungkapnya.

Bea Cukai Surakarta menggandeng pemerintah daerah dalam menyosialisasikan program itu. Salah satunya merapat ke pedagang pasar tradisional melalui pagelaran budaya dan kearifan lokal. Ia menyebut, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sangat membantu pembangunan daerah. Pendapatan pajak dari sektor cukai

juga menopang postur APBN. “Sebanyak 10 persen APBN itu dari pendapatan pajak. Jadi, cukai rokok sangat penting untuk keuangan negara,” katanya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Karanganyar, Martadi mengatakan gempur rokok ilegal di Pasar Tegalgede bertabur doorprize. Para pedagang selain didukasi dan dihibur juga berhak memenangkan hadiah menarik. “Tujuannya agar pedagang menghindari iming-iming jualan rokok bodong. Pasar tradisional di 17 kecamatan sangat sampai dititipi rokok ilegal. Labanya enggak seberapa, risikonya dibawa ke Kantor Bea Cukai dan Kejaksaan,” jelasnya, usai menyerahkan bilah wayang kulit kepada Ki Dalang Waluyo Noto Carito.

Sosialisasi ke pedagang pasar di-jatah dua kali dalam tahun ini. Mariadi juga memerintahkan mantri retribusi pasar agar ikut menyosialisasikan gempur rokok ilegal tiap kali menarik retribusi ke pedagang. **(Lim)-d**



KR-Abdul Alim

Petugas Bea Cukai dan Disdagerin blusukan di Pasar Tegalgede.